***Branchless Banking* Ditinjau Dari Persepektif Ekonomi Kelembagaan**

Oleh :
I Gst. Ngr. Alit Asmara Jaya, SE., M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mahendradatta, Denpasar,
Bali
E-mail : alit20147@gmail.com

Abstract

Melalui peraturan OJK, SE OJK No. 6/SE.OJK.03/2015 taggal 06 Februari 2015 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif dikenal dengan Laku Pandai, telah diluncurkan program layanan *branchless banking* dalam rangka meningkatkan akses perbankan kepada masyarakat bawah, utamanya masyarakat belum berbank (*unbanked*).

Perkembangan program Laku Pandai (*branchless banking*) sejak 5 tahun terakhir telah mampu berkontribusi terhadap peningkatan indek inklusi keuangan Indonesia cukup signifikan. Teori eknomi menyatakan bahwa dengan meningkatnya inklusi keuangan akan meningkatkan *inclusive growth*. Pertumbuhan inklusif dapat dikatakan sebagai pertumbuhan yang melibatkan partisipasi semua yaitu pertumbuhan tanpa diskriminasi dan mampu melibatkan seluruh sektor ekonomi (Klasen, 2010). Pertumbuhan inklusif memungkinkan setiap orang untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Tulisan ini akan mencoba meninjau dari persepektif ekonomi kelembagaan tentang layanan agen bank yang disebut dengan *Branchless Banking*. Untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan program agen bank Laku Pandai, penulis akan mengambil studi kasus penerapan di Provinsi Bali berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada tahun 2018. Bagaimana program Laku Pandai sebagai bentuk layanan keuangan inklusif dari persepektif ekonomi kelembagaan bisa meningkatkan inklusi keuangan dan memberi manfaat bagi ekonomi masyarakat.

Kata kunci : *Branchless banking*, Laku Pandai, Agen bank, Kelembagaan dan Inklusi Keuangan.

I. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi selama ini masih menekankan pada angka pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) sebagai tolak ukur kemajuan ekonomi sehingga orientasinya mengejar angka pertumbuhan yang tinggi. Angka pertumbuhan belum mencerminkan kualitas pertumbuhan dan keadilan serta masih bersifat eksklusif. Oleh karenanya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menekankan perlunya paradigma pembangunan baru yang lebih bersifat inklusif. Pendekatan pembangunan yg terlalu berorientasi kepada pertumbuhan, telah menghasilkan eksklusi sosial dan tiga krisis besar, berupa ketimpangan sosial pembangunan, kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Pembangunan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara

berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah (BAPPENAS, 2017).

Terciptanya pembangunan inklusif yang menciptakan pertumbuhan inklusif (*inclusive growth*) maka seluruh masyarakat seharusnya inklusif dalam layanan keuangan atau *financial inclusion* (Bustanul Arifin, 2016). Keuangan inklusif adalah suatu keadaan dimana seluruh masyarakat dapat menjangkau akses layanan secara mudah dan memiliki budaya untuk mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan (POJK, 2014). Kebijakan tentang program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif) atau dikenal dengan isitilah *Branchless Banking*, sesuai ketentuan dalam POJK tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan inklusi keuangan dalam mencapai pembangunan inklusif. Hal tersebut sejalan dengan Pilar ke 3 dari pembangunan ekonomi inklusif yang bertumpu pada perluasan akses dan kesempatan dengan sub pilar keuangan inklusif. Secara kelembagaan *Branchless Banking* merupakan *agent banking* yang

sejak 5 tahun terakhir mampu meningkatkan nilai ekonomi pengguna layanan disamping telah mampu meningkatkan indeks inklusi keuangan Indonesia.

II. Literatur Review

Pada tahun 2010 hasil riset Mc Kinsey & Company tentang *Global Financial Inclusion* menyatakan tingkat inklusi keuangan Indonesia sebesar 49 persen. Artinya sebanyak 49 persen dari jumlah penduduk Indonesia belum terjangkau layanan keuangan formal. Jumlah tersebut jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia dan Singapore masih lebih tinggi Indonesia. Berbagai definisi tentang inklusi keuangan, menekankan pada aspek yang berbeda namun secara substantif sama. Inklusi keuangan adalah suatu keadaan di mana seluruh masyarakat dapat menjangkau akses layanan keuangan secara mudah dan memiliki budaya untuk mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan (POJK, 2014). Definisi lain

inklusi keuangan adalah hak setiap orang untuk memiliki akses penuh ke layanan keuangan yang berkualitas secara tepat waktu, nyaman, informatif dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migran dan penduduk di daerah terpencil (TNP2K, Kantor Wakil Kepresidenan).

Untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) telah melakukan inisiatif untuk mendorong layanan perbankan tanpa kantor (*branchless banking*) yang lebih dikenal dengan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif). Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, tetapi melalui

kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (Surat Edaran OJK, 2014 dan 2015). Ketentuan Laku Pandai mengatur tentang 1) tujuan layanan; 2) model bisnis; 3) produk dan fitur; 4) tentang agen; 5) perlindungan konsumen; 6) manajemen risiko; 7) teknologi informasi dan; 8) penyelenggara. *Branchless banking* dalam wujud nyatanya adalah berbentuk keagenan bank. Agen bank adalah lembaga keuangan formal yang membuat perjanjian dengan pihak ke tiga untuk menawarkan jasa-jasa perbankan atas nama bank dan bukan atas namanya sendiri (Getanga dalam Abdirisack dkk, 2015). Agen bank dalam ketentuan tentang Laku Pandai adalah pihak ke tiga yang merupakan kepanjangan dari bank untuk melayani nasabah secara bertatap muka menggunakan teknologi informasi yang diselenggarakan oleh bank. Pengaturan agen bank dalam ketentuan OJK antara lain

menyangkut tentang bank penyelenggara, syarat menjadi agen, model kerjasama agen dan transaksi yang boleh dilakukan agen.

Sebagai agen bank, transaksi yang bisa dilakukan ada 2 jenis yaitu transaksi finansial dan non finansial. Transaksi finansial meliputi penyetoran dan penarikan ke dan dari rekening; pengiriman dan penerimaan transfer; pembayaran tagihan dan; pembelian pulsa. Sedangkan yang bersifat non finansial meliputi pembukaan dan penutupan rekening; uji tuntas nasabah (*Customer Due Dilligent*); edukasi dan promosi kepada nasabah dan; layanan pelanggan dan hubungan nasabah. Status sebagai agen bank yang merupakan perpanjangan tangan bank, agen memiliki keterbatasan dalam jenis dan nilai nominal transaksi yang bisa dilakukan. Demikian juga adanya batasan lain sebagai mana layaknya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank sebagai prinsipalnya. Batasan lain dimaksud seperti menjaga

kerahasiaan data nasabah, pencegahan *fraud* (kecurangan) oleh nasabah, kejujuran yang harus dimiliki sebagai agen dan bekerja sesuai SOP maupun standar layanan yang ditetapkan.

Program Laku Pandai secara kelembagaan menciptakan nilai ekonomi bagi para pelaku sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan pelaksanaannya.

Kelembagaan dapat didefinisikan sebagai upaya mendesain pola interaksi antar pelaku ekonomi sehingga bisa melakukan transaksi dan kelembagaan berkonsentrasi menciptakan efisiensi ekonomi, politik dan sosial antar pelaku (Ahmad Erani Yustika, 2013). Lebih jauh disebutkan bahwa fokus ekonomi kelembagaan diantaranya 1) peduli kepada penyelesaian persoalan ekonomi yang spesifik sehingga menghasilkan perbaikan yang signifikan; 2) melakukan pengembangan kelembagaan sebagai respon atas pengalaman-pengalaman ekonomi, demikian juga dampak kelembagaan akan

memengaruhi pengalaman ekonomi dan; 3) ekonomi kelembagaan lebih memfokuskan analisisnya pada transaksi yang terjadi antara dua atau lebih pelaku ekonomi.

Pandangan para ahli ekonomi tentang ekonomi kelembagaan meliputi 8 aspek. Beberapa diantaranya adalah 1) bahwa ekonomi kelembagaan cenderung menekankan proses evolusioner daripada ekonomi klasik yang berproses otomatis; 2) bahwa ahli-ahli ekonomi menolak pandangan pasar bebas dan pasar yang efisien; 3) bahwa teori ekonomi kelembagaan merupakan *value* dan kepentingan terhadap kelembagaan; 4) bahwa ekonomi kelembagaan menolak teknologi sebagai suatu yang *given*, melainkan perubahan yang berkesinambungan dan; 5) bahwa ekonomi kelembagaan melihat ekonomi merupakan cara pandang yang menyeluruh (*holistic way*) dan mencoba untuk menjelaskan aktivitas ekonomi dalam

persepektif yang multidisipliner.

Ekonomi kelembagaan muncul karena adanya problem-problem ekonomi yang tidak mampu diselesaikan oleh teori-teori ekonomi klasik. Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi nasional dan wilayah tidak terlepas dari adanya kontribusi organisasi-organisasi yang sifat dan bentuknya formal maupun informal. Secara kelembagaan organisasi-organisasi tersebut mampu memberikan kontribusi ekonomi dalam mendukung keberhasilan pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Praktek-praktek ekonomi kelembagaan yang ada telah melahirkan disiplin ilmu ekonomi kelembagaan baru (*New Institution Economics*) seperti ekonomi biaya transaksi, ekonomi sosial baru, ekonomi publik dan ekonomi politik dan lain-lain. Diantara semua itu yang banyak menjadi acuan akhir-akhir ini dalam melihat keberhasilan

pembangunan di suatu wilayah yaitu adanya modal sosial.

Ekonomi kelembagaan baru mengeksplorasi gagasan kelembagaan non-pasar diantaranya seperti hak kepemilikan, kontrak dan biaya transaksi sebagai jalan mengkompensasi kegagalan pasar (*market failure*). Identifikasi atas penyebab kegagalan sebagai sumber kunci yang meyakinkan perlunya kelembagaan non pasar (Ahmad Yustika Erani, 2013). Secara spesifik ekonomi kelembagaan baru melihat perilaku manusia dalam semua kegiatan (termasuk ekonomi) ditujukan kepada 2 hal yaitu 1) keuntungan ekonomi (*economic gain*) dan; 2) penerimaan sosial (*social acceptance*). Perkembangan yang terjadi dengan perilaku penerimaan sosial sulit dianalisis dengan sudut pandang ekonomi saja. Ekonomi kelembagaan baru membangun gagasan dan organisasi berupaya mencapai efisiensi, minimalisasi biaya menyeluruh tidak hanya biaya produksi tetapi juga biaya

transaksi. Ekonomi kelembagaan baru secara definitif adalah bidang ilmu yang multidisipliner dengan beberapa cabang ilmu. Secara umum cabang-cabang tersebut terbagi menjadi 2 kategori yaitu 1) *new economic history* dengan fokus pada analisa makro dan; 2) *transaction cost economic* dengan fokus pada analisis mikro seperti tata kelola.

III. Pembahasan

Perkembangan agen bank dalam layanan *Branchless banking* selama 5 tahun terakhir sejak diluncurkan program tersebut 2015, telah mengalami perkembangan sangat pesat dalam pertumbuhan jumlah agen, rekening, dana tabungan dan

sebaran lokasi agen. Hal tersebut mengindikasikan secara umum keberadaan agen bank sebagai solusi dalam meningkatkan inklusi keuangan dapat diterima oleh masyarakat. Perkembangan kinerja agen bank program Laku Pandai dari 2015 sampai dengan Maret 2019 dapat dilihat dari tabel 3.1 di bawah ini. Jika dilihat dari tabel di bawah ini, semua indikator kinerja agen bank program Laku Pandai selama 5 tahun terakhir sejak diimplementasikan, mengalami peningkatan sangat pesat. Kenaikan mencapai rata-rata setahun sebesar 446,25 persen untuk jumlah agen; 504,55 persen untuk jumlah rekening; 802,61 persen untuk saldo tabungan dan; 58,33 persen untuk lokasi agen.

Tabel 3.1
Perkembangan Kinerja Agen Bank Laku Pandai

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019 (September)
Jumlah Agen (unit)	60.805	275.911	740.121	1.004.547	1.146.187

Jumlah Rekening Tabungan	1.216,95	3.700,21	13.645,39	22.833,62	25.777,82
(Ribu)					

Jumlah Saldo Tabungan	67	216,5	1.030	1.570	2.218
(Rp. mily)					

Loksi Agen (Kabupaten & Kota)	21	507	512	509	511
-------------------------------	----	-----	-----	-----	-----

Sumber : Website OJK, 2019

Kinerja frekuensi transaksi dari agen bank program Laku Pandai pada periode yang sama per wilayah pulau, dapat dilihat sesuai grafik dibawah ini. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa frekuensi transaksi pemindahbukuan (warna merah) merupakan frekuensi transaksi tertinggi di semua wilayah, kemudian diikuti dengan frekuensi

pembayaran tagihan (warna biru). Jenis transaksi penyetoran menjadi frekuensi ketiga yang tinggi (warna ungu). Jenis transaksi dengan frekuensi tertendah adalah transaksi penarikan tunai. Kebutuhan nasabah akan pelayanan keuangan dalam bentuk pemindahbukuan dan pembayaran tagihan menjadi tujuan utama nasabah menjadi nasabah agen.

Untuk kebutuhan tersebut diikuti dengan kegiatan penyetoran tunai untuk mengisi saldo agar pemindahbukuan dan pembayaran tagihan dapat dilakukan. Berdasarkan pengalaman di negara-negara lain, langkah masyarakat yang *unbanked* (belum

mengenal layanan bank) menjadi nasabah penabung permanen, didahului dengan transaksi pemindahbukuan dan pembayaran terlebih dahulu. Lama kelamaan mereka akan mulai menyisakan uang di rekening sebagai tabungan

Grafik 3.1
 Frekuensi Transaksi Tahun 2015 – 2019

Berdasarkan hasil penelitian Alit dan Djinar (2018) dengan studi kasus penerapan agen bank program Laku Pandai di Bali, variabel manfaat dan edukasi memiliki pengaruh

langsung yang signifikan terhadap penggunaan agen bank program Laku Pandai dengan nilai signifikansi dengan nilai T-Statistik masing-masing sebesar 2,446 dan 5,105, lebih besar dari T-Hitung 1,65 pada tingkat $\alpha =$

0,10. Agen bank Laku Pandai merupakan layanan keuangan yang dilakukan oleh unit-unit usaha individu bekerja sama dengan bank-bank sebagai penyelenggara. Sebagai institusi keuangan, kepercayaan terhadap agen menjadi kunci keberhasilan agen dalam melayani transaksi keuangan. Dalam penelitian di Bali, hal tersebut juga ditunjukkan dengan variabel kepercayaan sebagai variabel mediasi memiliki pengaruh yang signifikan juga terhadap penggunaan agen dengan nilai T-Statistik sebesar 6,470 lebih besar dari T-Hitung sebesar 1,65. Agen bank program Laku Pandai memberikan kemudahan dalam bertransaksi bagi masyarakat bawah karena kemudahan, kecepatan dan murah karena agen melayani transaksi nasabah menggunakan teknologi EDC (*Electronick Data Capture*) yang terhubung secara *online/realtime* dengan kantor cabang bank. Cakupan layanan yang luas juga memberikan kenyamanan dan kemudahan seperti layaknya bertransaksi di kantor cabang bank tanpa harus mendatangi kantor cabang. Peran edukasi dari para agen terhadap

nasabah mampu memberikan pemahaman terhadap fitur, proses dan manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan layanan agen bank program Laku Pandai. Intensitas penggunaan dengan manfaat dan tingkat kepercayaan yang tinggi dari para nasabah, intensitas penggunaan agen dari 100 responden yang diteliti, sebesar 65 persen berada di kisaran cukup tinggi dan tinggi.

Sebagai gambaran transaksi yang bisa dilakukan di agen, sesuai hasil riset yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini. Secara garis besar terdapat 2 jenis transaksi yang dapat dilakukan yaitu transaksi finansial dan non finansial. Transaksi finansial merupakan jenis transaksi yang mengandung/melibatkan nilai uang, sedangkan transaksi non finansial merupakan jenis transaksi yang tidak mengandung/melibatkan nilai uang namun bersifat pemberian informasi dan administratif. Mayoritas transaksi di agen adalah transaksi finansial untuk mana agen bank program Laku Pandai dibuat, dengan maksud memberikan akses kemudahan

masyarakat melakukan transaksi meningkatkan inklusi keuangan.
 keuangan dalam rangka

Tabel 3.2
Jenis Transaksi di Agen

Jenis Transaksi	Uraian	Kategori
Setor tunai ke rek. tabungan sendiri	Nasabah melakukan penyetoran tunai ke rekening tabungan atas nama penyetor/milik sendiri dalam bank yang sama di seluruh Indonesia	Finansial
Setor tunai ke rek.tabungan orang lain	Nasabah melakukan penyetoran tunai ke rek. Tabnungan atas nama bukan penyetor/orang lain dalam bank yang sama di seluruh Indonesia	Finansial
Transfer/kirim uang	Nasabah mengirim uang ke bank lin atas nama rekening tabungan sendiri atau orang lain dari rekening sendiri.	Finansial
Tarik tunai	Nasabah melakukan penarikan tunai dari rek. Tabungan sendiri dalam bank yang sama dan penarikan kiriman uang	Finansial
Pembayaran	Nasabah melakukan pembayaranseperti BPJS, listrik psaca bayar, angsuran kredit perusahaan finance, PAM dan lain-	Finansial

	lain mitra kerjasama bank	
Pembelia	Nasabah melakukan pembelian seperti pulsa listrik dan pulsa handphone	Finansial
Penutupan asuransi	Pembelian polis asuransi jiwa dan kecelakaan mikro	Finansial
Registrasi E-Money	Menerima pendaftaran/pembelian uang elektronik yang dikeluarkan oleh bank penyelenggara agen	Non finansial
Top Up E-Money	Nasabah melakukan isi ulang saldo uang elektronik provider mitra kerjasama bank	Finansial
Cek saldo	Nasabah melakukan pengecekan saldo rekening tabungan sendiri	Non Finansial
Referral kredit	Nasabah mengajukan kredit lewat agen untuk selanjutnya direferensikan ke bank	Non Finansial

Sumber : Hasil penelitian, 2018

Bercermin dari hasil penelitian di atas, kalau dihubungkan dengan kinerja program Laku Pandai secara nasional, maka paling tidak manfaat yang diperoleh nasabah dan kepercayaan yang terjaga pada agen sebagai perpajakan tangan bank. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa dengan kondisi tersebut membawa kepada meningkatnya jumlah rekening dan saldo tabungan masyarakat sangat pesat sejak diimplementasikannya tahun 2015. Sebagai *outcome* dari jumlah dana tabungan yang dapat dihimpun melalui program dimaksud, apabila kita mengacu kepada LDR (*Loan to Deposit Ratio*) perbankan sebesar 92 persen sebagai batas aman sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK), maka pembiayaan sektor riil yang bisa diberikan dalam bentuk kredit kepada masyarakat bisa mencapai sebesar Rp. 2.040,56 milyar. *Multiflier effect* dari jumlah yang mencapai triliunan akan memberikan pergerakan ekonomi yang lebih luas. Bank sebagai lembaga intermediasi, keberadaan agen juga mampu memfasilitasi transaksi keuangan yang efisien karena lokasi agen yang relatif dekat dengan domisili masyarakat dan jam operasional

layanan yang tidak mengenal hari libur layaknya seperti kantor cabang.

Kelembagaan dimaknai sebagai apapun yang bernilai tambah atau kritik terhadap ekonomi klasik, bahkan kelembagaan sebagai apapun yang berhubungan dengan perilaku ekonomi (*economic behaviour*). Dihubungkan dengan tujuan kelembagaan, maka ekonomi kelembagaan berkonsentrasi untuk menciptakan efisiensi ekonomi (Erani Yustika, 2012). Berdasarkan beberapa pengertian sebelumnya, maka agen bank dapat dikatakan sebagai kelembagaan khususnya Ekonomi Kelembagaan Baru. Hal tersebut dapat dilihat dari persepektif hal-hal sesuai di bawah ini.

1. Penggunaan agen dalam transaksi perbankan merupakan perilaku ekonomi masyarakat yang baru, sejalan pengertian kelembagaan bahwa apapun yang berhubungan dengan perilaku ekonomi (*economic behaviour*). Agen bank program Laku Pandai bertujuan meningkatkan budaya menabung bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan. Perilaku dimaksud sudah dapat dikatakan terbentuk dengan melihat kinerja jumlah nasabah yang mencapai jutaan dengan saldo rekening tabungan yang

mencapai triliunan rupiah sesuai data tersaji di atas. Perilaku lain ditunjukkan dengan melihat frekuensi transaksi setoran tunai yang tinggi di masing-masing wilayah sesuai gambar di atas.

2. Fokus pengguna agen bank adalah masyarakat bawah/*unbaked* yang secara inklusi keuangan belum memiliki akses karena alasan lokasi, biaya mahal, syarat nasabah yang sulit dan rancangan produk yang tidak sesuai kebutuhan. Akses layanan keuangan menurut ekonomi kelembagaan merupakan hak alamiah masyarakat. Ini sejalan dengan pengertian bahwa kelembagaan sebagai kerangka hukum dan hak-hak alamiah (*natural right*) yang mengatur tindakan individu. Hak masyarakat suatu negara menikmati hasil-hasil pertumbuhan ekonomi namun dengan eksklusifitas yang dialami dengan kendala-kendala tersebut, kue pertumbuhan belum sepenuhnya mereka nikmati.
3. Penggunaan agen bank menjadi perilaku baru masyarakat dalam mengakses layanan perbankan. Kinerja yang terus meningkat dari agen bank menunjukkan adanya kepercayaan terhadap fungsi agen sebagai tempat melakukan transaksi yang mudah, murah, aman dan terpercaya. Ini sejalan dengan

pengertian ekonomi kelembagaan dilihat dari apapun yang berhubungan dengan perilaku ekonomi (*economic behaviour*). Penggunaan agen bank merupakan perilaku baru yang bermotif ekonomi.

4. Pola transaksi sebagai perilaku baru dalam mengakses layanan bank, penggunaan agen bank menciptakan efisiensi ekonomi dimana dengan bekerja sama dengan unit-unit usaha pelaku ekonomi kecil (warung, toko dan usaha mikro lainnya) penyedia layanan dalam hal ini perbankan, tidak perlu menyediakan infrastruktur fisik dengan biaya mahal dalam membuka cabang-cabang bank untuk menjangkau masyarakat bawah dan jauh dari pusat-pusat kegiatan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pengertian bahwa kelembagaan berkaitan dengan proses yang merujuk pada upaya mendesain pola interaksi antarpelaku ekonomi sehingga bisa melakukan transaksi dan dengan tujuan menciptakan efisiensi ekonomi. Perbankan dapat menghimpun dana murah melalui agen-agen bank mitra kerjasamanya sehingga menurunkan biaya kredit dan overhead.
5. Agen bank memiliki payung hukum dan aturan-aturan dalam

melakukan interaksi ekonomi seperti proses transaksi, persyaratan sebagai agen, kontrak keagenan dan lain-lain. Hal ini sejalan kelembagaan sebagai aturan² yang membatasi perilaku menyimpang manusia untuk membangun struktur interaksi ekonomi. Menciptakan ketertiban dalam melakukan pertukaran. Perilaku masyarakat yang menyimpan uang di rumah, menganggap akses ke bank sulit, mahal dan banyak syarat serta beranggapan bank hanya untuk orang-orang tertentu yang memiliki uang dan teredukasi. Keberadaan agen bank menjadi solusi atas kendala-kendala tersebut dengan menciptakan aturan layanan perbankan yang cepat, mudah dan murah.

6. Ekonomi klasik menekankan mekanisme pasar dalam menggerakkan perekonomian tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Industri perbankan tidak terlepas dari hal tersebut dengan menggarap sektor-sektor yang menguntungkan secara finansial. Melayani masyarakat unbanked dengan keterbatasan finansial, edukasi dan domisili yang jauh dari keberadaan infrastruktur perbankan menjadikan mereka eksklusif dari layanan jasa keuangan formal. Branchless Banking dengan agen

bank program Laku Pandi, dilihat dari persepektif Ekonomi menjadi solusi dalam mengatasi eksklusifitas menjadi inklusifitas. Kehadiran banyak lembaga keuangan informal di desa-desa adalah bentuk ekonomi kelembagaan mengatasi masalah sulitnya akses ke lembaga keuangan formal seperti perbankan.

7. Agen bank menggunakan teknologi berbasis internet seperti handphone, EDC dan WEB. Penggunaan teknologi memudahkan, mempercepat dan meningkatkan produktifitas, akan terus berkembang sejalan dengan kemajuan di industri. Kelembagaan ekonomi memiliki anggapan bahwa teknologi merupakan sesuatu yang berkembang bukan given seperti halnya teori-teori ekonomi klasik. Secara ekonomi kelembagaan, sektor-sektor ekonomi tidak terlepas dari kemajuan teknologi yang pesat selama satu dasawarsa terakhir khususnya menyangkut teknologi digital. Sebagai contoh fintech dengan memanfaatkan teknologi digital telah meningkatkan inklusifitas kredit cukup besar dan cepat. Dengan demikian, teknologi mendorong kemajuan ekonomi, merupakan konsep pemikiran dalam ekonomi

kelembagaan dimana teknologi adalah sebagai *driven*.

Berdasarkan pemetaan atas perseptif agen bank sebagai ekonomi kelembagaan, dapat disimpulkan bahwa agen bank program Laku Pandai sebagai model ekonomi kelembagaan, mampu menjawab persoalan bagaimana meningkatkan inklusi keuangan. Perkembangan kinerja yang terus meningkat, dengan dukungan pemerintah maupun regulator, diharapkan agen bank program Laku Pandai diprediksi akan meningkatkan indek inklusi keuangan Indonesia. Meskipun saat ini indek tersebut sudah mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 67,16 persen menjadi 76,19 persen, namun sustainabilitas tetap perlu dijaga, sehingga terwujud inklusi keuangan yang menciptakan kue pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

III. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan di atas adalah sesuai dibawah ini.

1. *Branchless Banking* merupakan model layanan bank tanpa kantor dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan. Di Indonesia, melalui ketentuan dalam SE POJK model layanan dimaksud

diwujudkan dalam bentuk agen bank program Laku Pandai.

2. Kinerja program secara nasional selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan sangat pesat yaitu jumlah agen, jumlah rekening dan saldo rekening tabungan yang dihimpun dari masyarakat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa model layanan bank tanpa kantor dalam meningkatkan inklusi keuangan, mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
3. Studi empiris tentang implementasi program dimaksud di Bali, menunjukkan bagaimana manfaat program, edukasi konsumen tentang program dan kepercayaan tentang program memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan agen. Manfaat dan edukasi mampu menciptakan kepercayaan nasabah akan program dan agen.
4. Pemaknaan agen bank program Laku Pandai dari perseptif kelembagaan, merupakan ekonomi kelembagaan baru (*New Institutionamampul Economics*) dengan ciri-ciri teoritis yang melekat pada implementasi program.
5. *Branchless Banking* dengan agen bank program Laku Pandai sebagai bentuk model ekonomi kelembagaan baru (NIE) menciptakan perilaku baru

masyarakat dalam mengkases layanan perbankan, menciptakan efisiensi ekonomi dalam penyediaan layanan perbankan dan menggunakan teknologi berbasis internet dalam melayani nasabah. Kesemuanya merupakan praktek-praktek pelaksanaan teori dasar dari ekonomi ekononomi kelembagaan.

6. Pelaksanaan program agen bank Laku Pandai menjadi penguatan atas teori ekonomi kelembagaan dan diharapkan ke depan akan terus disempurnakan sehingga apa yang menajdi tujuan program dapat tercapai

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abdirisack., Jaldesa., Murtini, Willy., Unyi Mangi dan Sumba Mathews, 2015. *Factors Influencing The Use Of Agency Banking Among Entrepreneurs : A Survey Of Business In West Palent Sub-County. The International Journal Of Business & Management*
2. Ahmad Erani Yujstika, 2012. *Ekonomi Kelembagaan*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
3. Asmara Jaya dan Nyoman Djinar S, 2018. *Factors Affecting Customer Using Agent Bank Laku Pandai Program in Bali*. International Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 2 No. 2, August 2018, pages: 194~213 e-ISSN: 2550-7001.
4. Bustanul Arifin, 2016. *Menuju Ketangguhan Ekonomi*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
5. Klasen, Stephen. 2010. *Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals*. ADB Sustainable Development Working Paper Series.
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Sebagai Indikator Kualitas Pembangunan Nasional dan Daerah*. Public Hearing Index Pembangunan Ekonomi Inklusif Jakarta, 25 April 2019
7. McKinsey & Company, 2010. *Hasil Riset Global Financial Index*
8. Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Salinan POJK No. 19/POJK 03/2014 tanggal 18 Nopember 2014 tentang *Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif*.
9. Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Salinan SE OJK No. 6/SE.OJK.03/2015 tanggal 06 Februari 2015 tentang *Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif oleh Bank*.

10. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, 2020. Laku Pandai, Sahabat Masyarakat (Online) Tersedia dari : <https://www.ojk.go.id/id/Pages/Laku-Pandai.aspx> (Diakses 30 Juni 2020).
11. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, 2019. Siaran Pers Survei OJK 2019 Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Meningkat. (Online) Tersedia dari : [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-PersSurvei-OJK-2019-Indeks-Literasi -Dan-Inklusi-Kuangan-Meningkat.aspx](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-PersSurvei-OJK-2019-Indeks-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-Meningkat.aspx) (Diakses 30 Juni 2020).
12. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2012. *Strategi Nasional Keuangan Inklusif*. Jakarta :Kantor Wakil Kepresidenan RI.